

---

**PENGARUH PELATIHAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN  
MENENGAHDIKALANGAN MASYARAKAT MELALUI DINAS  
KOPERASI PERIZINAN DAN PERDAGANGAN DI KABUPATEN  
TAPANULI UTARA**

**Doni Fernando Nainggolan<sup>1</sup>, Budiman N.P.D Sinaga<sup>2</sup>**  
[donifernando.nainggolan@student.uhn.ac.id](mailto:donifernando.nainggolan@student.uhn.ac.id)<sup>1</sup>, [budiman.sinaga@uhn.ac.id](mailto:budiman.sinaga@uhn.ac.id)<sup>2</sup>  
**Universitas HKBP Nommensen Medan**

**Abstrak**

Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung perekonomian nasional. Dinas Koperasi, Perizinan, dan Perdagangan (KOPERINDAG) memegang peranan yang krusial dalam memajukan sektor usaha mikro. Peran dari dinas ini adalah untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi pelaku UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk menggali peran Dinas Koperasi, Perizinan, dan Perdagangan dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Tapanuli Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dokumentasi, serta pemanfaatan data sekunder dari jurnal dan buku. Lokasi penelitian berfokus pada Dinas Koperasi, Perizinan, dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Koperasi, Perizinan, dan Perdagangan dalam pemberdayaan pelaku usaha dapat dibagi menjadi beberapa aspek: 1) Peran Fasilitas, yang mencakup pemberian dukungan, pemanfaatan sumber daya, dan komunikasi. 2) Peran Edukasi, yang meliputi pemberian informasi tentang potensi dan peluang usaha, serta pelatihan. 3) Peran Perwakilan, yang meliputi kerjasama dalam pembinaan dan pengembangan potensi usaha, membuka jaringan kerja dengan pihak lain, serta memperoleh modal usaha. 4) Peran Teknis, yang berkaitan dengan keterampilan, manajemen, dan kemampuan dalam mengelola keuangan usaha.

**Kata Kunci:** Pelatihan, UMKM, Koperindag.

**PENDAHULUAN**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, termasuk di Kabupaten Tapanuli Utara. Berdasarkan data pada tahun 2023, jumlah UMKM di daerah ini mencapai sekitar 34.598, yang memberikan kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi setempat. Perkembangan UMKM di Indonesia, termasuk di Kabupaten Tapanuli Utara, menunjukkan potensi yang sangat besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Meskipun demikian, meskipun potensi tersebut sangat besar, banyak pelaku UMKM yang masih menghadapi kendala terkait kepatuhan hukum, terutama dalam hal perizinan dan standar operasional. Selain itu, banyak pelaku UMKM yang juga mengalami kesulitan dalam mematuhi regulasi hukum yang berlaku.

Dalam hal ini, Dinas Koperasi, Perizinan, dan Perdagangan (KOPERINDAG) Kabupaten Tapanuli Utara memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum di kalangan pelaku UMKM. Dinas KOPERINDAG bertugas memberikan dukungan serta pembinaan kepada pelaku UMKM dalam berbagai hal, termasuk kepatuhan terhadap regulasi yang berkaitan dengan izin usaha, perpajakan, perlindungan konsumen, dan aspek lingkungan. Namun, banyak pelaku UMKM yang masih kurang memahami pentingnya kepatuhan hukum, yang bisa berujung pada sanksi hukum dan dampak buruk bagi usaha mereka. Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 34.598 pelaku UMKM yang terdaftar di KOPERINDAG Kabupaten Tapanuli Utara.

Salah satu hambatan utama dalam meningkatkan kepatuhan hukum adalah minimnya pemahaman pelaku UMKM mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai pengusaha . Kepatuhan hukum sangat krusial bagi pelaku UMKM, yang mencakup pemenuhan terhadap peraturan yang berlaku, seperti izin usaha, kewajiban pajak, dan standar kualitas produk. Namun, banyak pelaku UMKM yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya mematuhi ketentuan hukum tersebut. Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan hukum di kalangan pelaku UMKM antara lain:

a. Akses Terbatas terhadap Informasi

Akses informasi mengenai regulasi dan prosedur perizinan seringkali terbatas bagi pelaku UMKM. Keterbatasan informasi ini menyebabkan mereka kesulitan dalam memahami langkah-langkah yang harus diambil untuk memenuhi kewajiban hukum.

b. Minimnya Bimbingan dari Instansi Terkait

Dinas KOPERINDAG, sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan UMKM, sering kali kekurangan sumber daya untuk memberikan bimbingan secara intensif kepada seluruh pelaku UMKM.

c. Stigma Negatif Terhadap Regulasi

Banyak pelaku UMKM yang merasa bahwa proses pengurusan izin dan kepatuhan hukum terkesan rumit dan memakan waktu. Stigma yang berkembang bahwa pemerintah seringkali menghambat usaha dengan berbagai regulasi yang dianggap membebani juga menjadi kendala bagi pelaku UMKM untuk mematuhi hukum.

Dinas KOPERINDAG berfungsi sebagai fasilitator untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku UMKM mengenai kepatuhan hukum melalui berbagai program sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan . Dengan pendekatan ini, diharapkan pelaku UMKM dapat lebih mengerti regulasi yang harus dipatuhi dan mampu mengelola usaha mereka dengan lebih baik sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Dinas KOPERINDAG telah meluncurkan berbagai program, di antaranya:

1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Dinas KOPERINDAG secara berkala menyelenggarakan sosialisasi terkait peraturan-peraturan terbaru yang berhubungan dengan usaha mikro dan kecil. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM mengenai kewajiban hukum yang harus mereka penuhi.

2. Pelatihan Manajemen Usaha

Melalui program pelatihan manajemen usaha, Dinas KOPERINDAG mendukung pengembangan keterampilan manajerial pelaku UMKM. Pelatihan ini meliputi berbagai aspek penting, seperti pengelolaan keuangan, strategi pemasaran produk, dan pemahaman terhadap regulasi yang berlaku.

3. Pendampingan dalam Proses Pengurusan Izin Usaha

Dinas KOPERINDAG menyediakan pendampingan bagi pelaku UMKM dalam proses pengajuan izin usaha. Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan pelaku UMKM dapat lebih mudah memahami prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin usaha.

Program-program ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada pelaku UMKM tentang pentingnya kepatuhan terhadap hukum serta manfaat yang bisa diperoleh dari pemenuhan regulasi. Meskipun Dinas KOPERINDAG telah melakukan berbagai upaya, masih ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah rendahnya partisipasi pelaku UMKM dalam program-program yang ada. Banyak pelaku UMKM yang merasa bahwa proses pengurusan izin dan kepatuhan hukum terlalu rumit dan memakan waktu. Di samping itu, ada juga anggapan bahwa pemerintah sering kali memberatkan usaha dengan berbagai regulasi yang dianggap menghambat.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih kreatif dan efisien untuk

meningkatkan pemahaman serta keterlibatan para pelaku UMKM dalam program-program tersebut.

1. Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur hak pekerja untuk bekerja di lingkungan yang aman dan sehat. Meskipun tidak secara langsung berkaitan dengan kegiatan UMKM, prinsip ini bisa diterapkan dalam pengelolaan tempat kerja yang dimiliki oleh pelaku UMKM.
2. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur hak masyarakat untuk mengakses informasi publik. Dalam hal UMKM, informasi terkait regulasi dan prosedur perizinan adalah informasi publik yang wajib tersedia bagi semua pihak.

Dengan meningkatnya tingkat kepatuhan hukum di kalangan pelaku UMKM, akan berdampak positif bagi perekonomian daerah secara keseluruhan. Pelaku UMKM yang mematuhi regulasi akan lebih mudah mengakses pasar formal, memperoleh dukungan dari lembaga keuangan, serta meningkatkan daya saing produk mereka. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kebijakan publik terkait pemberdayaan UMKM serta meningkatkan efektivitas program pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinas KOPERINDAG Kabupaten Tapanuli Utara.

## **METODE**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan hukum secara Yuridis Empiris, yang juga dikenal dengan penelitian lapangan, yaitu untuk mengkaji peraturan hukum yang berlaku dan membandingkannya dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang memandang hukum sebagai sistem norma yang terdiri dari asas-asas, kaidah, peraturan perundang-undangan, perjanjian, serta doktrin (ajaran). Sementara itu, penelitian yuridis empiris berfokus pada perilaku masyarakat, khususnya perilaku yang muncul akibat interaksi dengan sistem norma yang berlaku.

Dalam penelitian hukum yuridis empiris, penulis menggunakan metode wawancara, di mana peneliti berinteraksi langsung dengan pelaku UMKM, Dinas Koperasi dan Perindustrian (KOPERINDAG) Kabupaten Tapanuli Utara, serta ahli hukum, untuk menggali pendapat mereka tentang kepatuhan hukum dan peran dinas dalam mendukung UMKM. Wawancara ini dapat dilakukan dengan berbagai format, yaitu terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur, sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaruh Pelatihan Terhadap Kinerja Umkm Dikalangan Masyarakat Melalui Dinas Koperasi Perizinan Dan Perdagangan Di Kabupaten Tapanuli Utara**

Pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Perizinan, dan Perdagangan di Kabupaten Tapanuli Utara tentunya berperan penting dalam meningkatkan kinerja UMKM di setiap kecamatan. Dengan adanya pelatihan terkait pemahaman tentang legalitas usaha, para pelaku usaha dapat memanfaatkan berbagai fasilitas yang disediakan pemerintah untuk mengembangkan usaha mereka. Hal ini juga membuka peluang bagi mereka untuk menjalin kerjasama dengan merchant yang memerlukan legalitas usaha sebagai salah satu syarat.

Pelatihan merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memberikan, memperoleh, serta meningkatkan dan mengembangkan potensi, produktivitas, disiplin, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang kualifikasi atau pekerjaan yang diinginkan. Pelatihan ini berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan

keterampilan setiap pelaku usaha, serta memberikan kesempatan untuk mengoptimalkan dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh individu maupun masyarakat sesuai dengan kebutuhan mereka. Diharapkan, pelatihan untuk para UMKM dapat mendukung pengembangan usaha yang mereka jalani, sehingga usaha tersebut dapat berkembang lebih besar dengan produk yang lebih bervariasi.

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pelatihan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja pelaku usaha UMKM yang telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Perizinan, dan Perdagangan di Kabupaten Tapanuli Utara. Ini berarti, semakin baik pelatihan yang diterima oleh pelaku usaha UMKM, semakin baik pula kinerja mereka dalam mengelola usaha.

Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) telah terbukti memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja. Potensi yang dimiliki oleh pelaku usaha di Kabupaten Tapanuli Utara perlu dimaksimalkan dan dikembangkan secara berkelanjutan untuk mendukung pengembangan ekonomi masyarakat. Proses pengembangan ini akan berjalan dengan baik jika didukung oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait. Keberhasilan atau kegagalan suatu program atau kegiatan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor pendukung maupun penghambat. Untuk meningkatkan daya saing UMKM, penting untuk memahami kondisi UMKM saat ini. Daya saing ini bergantung pada kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam memproduksi barang, harga, desain, dan lingkungan yang mendukung agar UMKM dapat bersaing secara efektif. Faktor-faktor ini akan menjadi penentu kesuksesan dalam menjalankan UMKM yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melalui program pelatihan manajemen usaha, Dinas KOPERINDAG membantu pelaku UMKM dalam meningkatkan kemampuan manajerial mereka. Pelatihan ini mencakup aspek-aspek penting seperti pengelolaan keuangan, pemasaran produk, serta pemahaman terhadap regulasi. Adapun Pengaruh pelatihan terhadap kinerja UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di kalangan masyarakat melalui Dinas Koperasi, Perizinan, dan Perdagangan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Berikut adalah uraian mendetail mengenai dampak pelatihan tersebut:

a. Peningkatan Keterampilan dan Pengetahuan

Pelatihan yang diberikan oleh Dinas Koperasi, Perizinan, dan Perdagangan sering kali mencakup berbagai aspek penting yang relevan dengan pengelolaan usaha, seperti:

- Manajemen Keuangan: Pelatihan ini membantu pelaku UMKM dalam mengelola arus kas, membuat laporan keuangan yang baik, dan menghindari kesalahan fatal dalam pengelolaan dana.
- Pemasaran dan Penjualan: Pelatihan ini memberikan UMKM pengetahuan tentang metode yang lebih efisien untuk mempromosikan produk mereka, baik melalui saluran offline maupun online, dengan memanfaatkan platform media sosial, pemasaran digital, dan berbagai strategi lainnya.
- Penyusunan Rencana Bisnis: Pelaku UMKM diajarkan cara menyusun rencana bisnis yang efektif, yang dapat membantu mereka merencanakan dan mengelola bisnis mereka dengan lebih baik.
- Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM): Pelatihan tentang cara mengelola karyawan, mengatur peran dan tanggung jawab, serta menciptakan lingkungan kerja yang produktif.

b. Meningkatkan Akses ke Sumber Daya

Pelatihan juga sering kali membuka akses pelaku UMKM terhadap berbagai sumber daya yang penting, seperti:

- Akses ke Pembiayaan: Pelatihan yang diberikan sering kali melibatkan informasi tentang sumber-sumber pembiayaan untuk UMKM, baik itu melalui perbankan, lembaga keuangan mikro, maupun program pemerintah.

- Akses ke Pasar: Selain keterampilan pemasaran, pelatihan juga memberikan pemahaman tentang pasar yang lebih luas, baik lokal, regional, maupun internasional.
- Penyediaan Jaringan Bisnis: Melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, para pelaku UMKM dapat bertemu dengan sesama pelaku usaha, yang dapat membuka peluang kolaborasi dan jaringan bisnis baru.

#### c. Peningkatan Kualitas Produk

Pelatihan yang diberikan juga bisa mencakup teknik-teknik produksi yang lebih efisien, pengendalian kualitas, serta pemanfaatan teknologi terbaru dalam produksi. Dengan adanya pengetahuan ini, pelaku UMKM dapat meningkatkan kualitas produk yang mereka hasilkan, sehingga bisa lebih bersaing di pasar.

#### d. Meningkatkan Kepercayaan Konsumen

Pelatihan yang memperbaiki kualitas produk dan pengelolaan usaha juga berdampak pada peningkatan kepercayaan konsumen. Ketika pelaku UMKM menerapkan teknik pemasaran yang efektif, menjaga kualitas produk, dan memenuhi standar legalitas, maka konsumen akan lebih percaya dan tertarik untuk membeli produk mereka. Kepercayaan konsumen ini penting dalam meningkatkan volume penjualan dan kesuksesan jangka panjang usaha UMKM.

#### e. Pemanfaatan Teknologi

Di era digital saat ini, pelatihan juga berfokus pada pemanfaatan teknologi dalam operasional bisnis. Pelatihan tentang e-commerce, digital marketing, serta penggunaan perangkat lunak untuk manajemen bisnis sangat membantu UMKM untuk meningkatkan efisiensi dan memperluas jangkauan pasar mereka. Teknologi memungkinkan UMKM untuk bersaing di pasar yang lebih luas tanpa harus mengeluarkan biaya besar.

Dengan demikian, pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Perizinan, dan Perdagangan memiliki pengaruh yang sangat positif terhadap kinerja UMKM. Pelatihan ini dapat meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan akses terhadap sumber daya yang diperlukan oleh pelaku UMKM untuk mengelola usaha mereka dengan lebih efektif dan efisien. Selain itu, pelatihan juga berdampak pada peningkatan kualitas produk, pemanfaatan teknologi, dan penguatan aspek legal, yang kesemuanya berkontribusi pada kesuksesan jangka panjang UMKM dalam menghadapi tantangan pasar yang kompetitif.

## **SIMPULAN**

Pelatihan adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memberikan, memperoleh, serta meningkatkan dan mengembangkan potensi, produktivitas, disiplin, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang kualifikasi atau pekerjaan yang diinginkan. Pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Perizinan, dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja UMKM di setiap kecamatan. Dengan adanya pelatihan terkait pemahaman legalitas usaha, para pelaku usaha dapat memanfaatkan berbagai fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk pengembangan usaha mereka. Pelatihan ini juga membuka peluang bagi mereka untuk menjalin kerjasama dengan merchant yang membutuhkan legalitas usaha sebagai salah satu syarat. Oleh karena itu, pelatihan yang diadakan oleh Dinas Koperasi, Perizinan, dan Perdagangan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kinerja UMKM. Pelatihan ini dapat meningkatkan keterampilan, pengetahuan, serta akses terhadap sumber daya yang diperlukan oleh pelaku UMKM untuk mengelola usaha mereka dengan lebih efektif dan efisien. Selain itu, pelatihan juga berpengaruh pada peningkatan kualitas produk, pemanfaatan teknologi, dan penguatan aspek legal, yang semua ini berkontribusi pada kesuksesan jangka panjang UMKM dalam menghadapi tantangan pasar yang kompetitif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Mulyana Deddy, 2004, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, Rosdakarya. Saebani Beni Ahmad, 2009, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Adi, Isbandi Rukminto, 2008, Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta, Rajawali Pers.
- Asyhadi Zaeni, 2012, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Rahmana Arief, 2009, Peranan Teknologi Informasi dalam Peningkatan Daya Saing Usaha kecil Menengah, Yogyakarta.
- Tambunan Tulus, 2009, UMKM di Indonesia, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Edi Suharto, 2010, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Dani Danuar Tri U. (2013). Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Ekonomi Kreatif Di Kota Semarang: Diponegoro Journal Of Economies Volume 2 Universitas Diponegoro Semarang.
- Dinas Koperasi Perizinan dan Perdagangan (KOPERINDAG) Tapanuli Utara, Data UMKM Tarutung, 2023.
- Budiarta, Kustoro. 2009. Pengantar Bisnis. Jakarta: Mitra Wicana Media. David, Fred R. 2004. Manajemen Strategis: Konsep. Edisi Ketujuh. PT. Prenhallindo, Jakarta.